

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998 memberikan perubahan besar pada sistem politik Indonesia. Secara umum, perubahan tersebut terletak pada transformasi sistem politik Indonesia dari sistem politik yang bercorak otoriter, karena kekuasaan presiden yang sangat besar, menuju sistem politik yang lebih demokratis. Secara lebih parsial, perubahan itu terlihat dari adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sebelumnya bercorak sentralistik menuju corak yang desentralistik. Perubahan lain terlihat pada beberapa hal, seperti sistem multipartai, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers, dan upaya menjadikan birokrasi dan militer sebagai kekuatan profesional tetapi netral secara politik. Partai-partai politik juga berkembang pesat dengan berdirinya berbagai partai politik baru, termasuk partai politik berbasis aliran.

Berbagai unsur dalam masyarakat turut berpartisipasi dalam politik Indonesia pasca Orde baru, salah satunya adalah Islam tradisionalis. Islam tradisionalis di Indonesia identik dengan Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi yang didirikan oleh para ulama untuk mempertahankan paham tradisionalismenya. NU didirikan pada 31 Januari 1926 oleh KH. M. Hasyim Asy'ari. Sejak pendiriannya hingga saat ini, NU lebih banyak

menunjukkan peranan dalam hal politik, meskipun telah menyatakan kembali ke khittah 1926.

Karakter Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagai paham yang dianut oleh Islam tradisionalis, mengutamakan keseimbangan orientasi dalam memahami ajaran Islam. Konsekuensinya, watak komunikasi politik NU berlangsung di antara dua kutub pemikiran, yaitu radikal dan akomodatif. Dua kutub pemikiran NU tersebut terlihat dalam perjalanan politiknya di Indonesia sejak awal berdiri hingga saat ini. Dalam bidang politik, NU tetap menunjukkan sikap progresif dalam memberikan respon-respon situasional sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Sedangkan, watak tradisionalisme atau radikal lebih dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi keagamaan yang telah dirumuskan dalam kerangka empat madzhab fiqh. Sementara itu, perjalanan politik NU yang cenderung fluktuatif, merupakan perwujudan dari kutub pemikiran NU yang lain yaitu akomodatif. Sehingga dalam perkembangan politiknya, terutama pasca Orde Baru, NU menunjukkan kedua kutub pemikiran tersebut.

B. Saran

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan suku, budaya, dan golongan yang memiliki perbedaan-perbedaan pemikiran. Tetapi, perbedaan tersebut bukanlah suatu hal yang membuat Indonesia menjadi terpecah-belah. Perbedaan itulah yang menjadi semangat untuk bersatu dan melestarikan tradisi yang ada.

Sebagai umat Islam, tentu saja kita berkewajiban untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa tidak akan lengkap bila tidak diiringi oleh kontrol terhadap kekuasaan yang ada. Perwujudan pemerintahan yang adil dan bersih adalah cita-cita bangsa yang sampai saat ini masih belum terwujud sepenuhnya. Justru, indikasi-indikasi semakin merosotnya moral bangsa terlihat dalam hampir semua lini kehidupan, terutama pada pemerintah. Orientasi politikus bukan lagi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi lebih banyak untuk kepentingan pribadi berupa keamanan dan harta yang melimpah.

Islam tradisional yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama, sudah sewajarnya menjadi salah satu dari pelaksana dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan jumlah anggota yang besar dan pengalaman politiknya di Indonesia, seharusnya menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki bangsa dan negara. NU seharusnya juga harus mampu menunjukkan sikapnya terhadap gerak perjuangannya di Indonesia. Di masa yang akan datang, bila NU masih tetap ingin konsekuen pada keputusan kembali ke khittah 1926, perlu adanya dialog ulang antara para elit dan massa NU, untuk mengkaji ulang *maslahat* dan *mudharat* keterlibatan NU dalam politik praktis.

Sementara itu, komponen bangsa lain selain Islam tradisional juga harus mau berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Berbagai cara pandang yang berbeda mengenai konsep politik di Indonesia jangan sampai menjadi perdebatan yang memicu terjadinya disintegrasi

bangsa. Sesungguhnya para pelaku politik harus kembali ke konsep awal. Apa pun pilihannya, yang terpenting harus menempatkan suara rakyat, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Sehingga dalam mengelola negara perhatian terhadap rakyat menjadi yang utama.

